

DULAMAYO VILLAGE FROM 1941 TO 1999

Intan Usman^{1*}, Sutrisno Mohammad², Renol Hasan³

^{1,2,3}Department of History Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri
Gorontalo, Indonesia

intanusman384@gmail.com¹, sutrisno@ung.ac.id², renolhasan@ung.ac.id³

**Corresponding author*

Manuscript received January 9, 2025; revised August 20, 2025; accepted August 22, 2025; published August 23, 2025

ABSTRACT

This research aims to examine the history of the establishment of Dulamayo Village between 1941 and 1999, as well as its subsequent development. The method employed in this study is the historical method, which consists of four stages: heuristics (source collection), source verification or criticism—encompassing both external and internal criticism—interpretation, and historiography (historical writing). The findings reveal that Dulamayo Village was established in 1941 in Bongomeme District, approximately 25 kilometers from Gorontalo City. Prior to that, during the 17th and 18th centuries, Bongomeme was still a small hamlet that gradually developed into a larger district, eventually leading to territorial expansion that gave birth to Dulamayo Village. The name “Dulamayo” originated from an area where large wild mango trees grew abundantly, producing plentiful fruit; thus, since the mid-18th century, the area became known as Kampung Dulamayo. In the 19th century, this region was incorporated into Batudaa District before eventually becoming part of Bongomeme District. The period between 1941 and 1999 reflects significant development: in the early years, there were no schools, the community relied solely on subsistence farming, and the population remained small. However, by 1999, formal educational institutions had been established, agricultural products were being traded in markets, and the population increased substantially due to migration. Nevertheless, the tradition of Huhuyula, or mutual cooperation, continued to be preserved as a vital cultural identity of the community.

Keywords: Community, development, Dulamayo Village

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah terbentuknya Desa Dulamayo tahun 1941–1999 serta perkembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi atau kritik sumber yang mencakup kritik eksternal maupun internal, interpretasi (penafsiran), serta historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Dulamayo terbentuk pada tahun 1941 di Kecamatan Bongomeme, sekitar 25 kilometer dari Kota Gorontalo. Sebelum itu, pada abad ke-17 hingga ke-18, Bongomeme masih berupa kampung kecil yang kemudian berkembang menjadi kecamatan besar hingga memunculkan pemekaran wilayah yang melahirkan Desa Dulamayo. Nama “Dulamayo” berasal dari lokasi yang ditumbuhi pohon mangga hutan berukuran besar dan berbuah lebat, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 dikenal sebagai Kampung Dulamayo. Pada abad ke-19 wilayah ini masuk dalam Kecamatan Batudaa sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kecamatan Bongomeme. Periode 1941–1999 menunjukkan perkembangan signifikan, di mana awalnya belum tersedia sekolah, masyarakat hanya bertani untuk kebutuhan keluarga, dan jumlah penduduk masih sedikit. Namun, menjelang 1999 sudah berdiri lembaga pendidikan formal, hasil pertanian mulai

diperdagangkan di pasar, serta jumlah penduduk meningkat pesat karena migrasi. Meskipun demikian, tradisi Huhuyula atau gotong royong tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat.

Kata Kunci: *Desa Dulamayo, masyarakat, perkembangan*

PENDAHULUAN

Sejarah lokal diartikan sebagai peristiwa yang hanya terjadi di wilayah tertentu dan tidak meluas ke daerah lain. Pembahasan tentang sejarah daerah umumnya mencakup asal-usul wilayah tersebut serta perkembangan yang berlangsung di masa selanjutnya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas karena terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Begitu pula dengan kebudayaan, yang berasal dari proses sejarah yang panjang (Fahrudin, 2020). Oleh sebab itu, sejarah lokal merupakan kajian yang rumit karena meliputi berbagai aspek pengalaman kolektif di masa lalu, seperti sosial budaya, politik, agama, teknologi, ekonomi, dan lain-lain dalam lingkup wilayah tertentu (Widja, 1991).

Desa merupakan satuan wilayah terkecil, sehingga sejarah desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah lokal. Data mengenai asal mula terbentuknya desa, proses perkembangan, serta perubahan yang dialaminya, sangat membantu dalam merekonstruksi sejarah lokal secara utuh. Berbagai peristiwa dan dinamika sejarah, seperti perpindahan penduduk, konflik, masa penjajahan, maupun kebijakan pemerintah, sering kali berpengaruh terhadap terbentuknya dan berkembangnya desa. Di Indonesia, terdapat sekitar 73.000 desa dan kurang lebih 8.000 kelurahan.

Desa-desanya tersebut terbagi menjadi desa biasa dan desa adat (Sihabudin, 2025). Pembentukan desa merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Politik hukum ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan publik, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta perluasan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Harfi, 2016).

Sejarah pedesaan sering kali menimbulkan banyak pertanyaan. Mengingat sebagian besar peristiwa sejarah di Indonesia berlangsung di kawasan pedesaan, muncul pertimbangan apakah masih relevan menjadikan sejarah pedesaan sebagai kajian khusus dalam penelitian sejarah. Namun demikian, uraian mengenai pengertian dan cakupan sejarah tetap diperlukan, sebab bidang ini telah memiliki banyak cabang keilmuan, dan yang paling dekat dengan sejarah pedesaan adalah sejarah sosial maupun sejarah secara umum (Kuntowijoyo, 2003). Dari sisi historis, desa menyimpan banyak hal yang masih perlu diungkap, mulai dari asal-usul penamaan desa, proses terbentuknya, ciri khas masyarakatnya, keberadaan lembaga adat, hingga aturan atau hukum adat yang berlaku di dalamnya.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan dan tata pemerintahan, desa saat ini dipahami sebagai wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk dengan pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah camat, serta memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Netty et al., 2021). Berkaitan dengan struktur dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) mengatur pemerintahan desa berdasarkan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Pasal ini memberikan ruang bagi pembentukan susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia (Timotius, 2018). Selain itu, Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta aturan lain sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan serta peran dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan keuangan, sekaligus memperoleh fasilitas serta pembinaan dari pemerintah pusat, termasuk pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Marza et al., 2024).

Sejarah pedesaan adalah cabang sejarah yang secara khusus mengkaji Desa atau wilayah pedesaan adalah kesatuan wilayah teritorial dan administratif terkecil di Indonesia, yang menjadi tempat kehidupan masyarakat petani dan aktivitas ekonomi pertanian. telah banyak menjadi perhatian para peneliti, termasuk dari bidang ilmu di luar sejarah. Cakupan utama sejarah pedesaan terletak pada masyarakat petani. Untuk membedakannya dengan sejarah sosial, sejarah pedesaan harus selalu diarahkan kembali pada persoalan desa, kehidupan pedesaan, maupun ekonomi agraris yang berkembang di wilayah pedesaan.

Desa Dulamayo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Desa ini resmi berdiri pada tahun 1941, sebelumnya masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Bongomeme. Berdasarkan aspirasi masyarakat pada waktu itu, serta mempertimbangkan potensi dan luas wilayah yang ada, tokoh masyarakat di Bongomeme menginisiasi pembentukan Desa Dulamayo. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada sejarah Desa Dulamayo di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dengan tujuan untuk menelusuri proses berdirinya desa sejak tahun 1941 hingga perkembangan yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1999. Judul penelitian ini adalah Sejarah Desa Dulamayo 1941–1999.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan. Pertama, heuristik, yakni tahap awal penelitian sejarah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber atau bukti. Proses pengumpulan data dilakukan peneliti selama beberapa minggu, di mana diperoleh sejumlah informasi yang dapat dijadikan sumber penelitian, seperti arsip desa, dokumen, serta keterangan dari narasumber mulai dari kepala

desa hingga masyarakat. Kedua, kritik sumber atau verifikasi terhadap data yang telah dihimpun.

Teknik ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dengan cara memilah antara sumber yang valid dan yang tidak valid (Putri et al., 2024). Selanjutnya, tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yakni proses di mana peneliti menelaah, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap data yang diperoleh agar dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh.

Keempat, merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah yang dikenal dengan istilah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini peneliti menuliskan hasil interpretasi data ke dalam bentuk karya tulis yang tersusun secara sistematis, runtut, dan objektif, sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah Desa Dulamayo tahun 1941–1999. Selain itu, peneliti juga menitikberatkan pada pendekatan deskriptif-analitis, sehingga uraian yang dihasilkan tidak hanya menyajikan peristiwa, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan (Latif et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Terbentuknya Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Periode 1941-1999

Desa Dulamayo didirikan pada tahun 1941 dan berlokasi di Kecamatan Bongomeme, sekitar 25 kilometer dari pusat kota. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Bongomeme masih merupakan sebuah kampung kecil di wilayah Kabupaten Gorontalo. Hingga kini, masyarakat Gorontalo mengenal Bongomeme sebagai sebuah kecamatan besar bernama Kecamatan Bongomeme. Perkembangan yang cukup pesat di wilayah ini kemudian melahirkan pemekaran menjadi Desa Dulamayo. Penamaan Desa Dulamayo berawal dari ditemukannya sebuah lokasi yang dipenuhi pohon-pohon mangga hutan berukuran besar, menjulang tinggi, serta menghasilkan buah yang lebat dan subur. Karena itu, pada pertengahan abad ke-18 wilayah tersebut mengalami perluasan dan dikenal dengan nama Kampung Dulamayo.

Pada abad ke-19, masyarakat Gorontalo telah mengenal Kampung Dulamayo yang ketika itu masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Batudaa, dan saat ini telah berkembang menjadi Kecamatan Bongomeme (wawancara dengan Bapak Rum Telesena, 1 Agustus, di Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme). Dengan bertambahnya jumlah penduduk, Kampung Dungaliyo memperluas areanya melalui pembukaan hutan di bagian barat untuk menambah lahan pertanian. Dalam proses perluasan tersebut ditemukan suatu kawasan yang dipenuhi Di Dulamayo, terdapat pohon-pohon mangga hutan yang besar dan subur. Salah satu pohon mangga hutan yang paling tinggi, besar, dan berbuah lebat di antara pohon-pohon tersebut kemudian ditebang.

Walaupun batang pohon mangga hutan tersebut sudah ditebang, pohon itu masih tetap berdiri tegak dan tidak bergeming sedikit pun, meskipun Sudah ditarik oleh banyak orang menggunakan tali dan rotan. Karena kejadian tersebut, para ahli makhluk gaib

(Panggoba/Dukun) kemudian berkumpul untuk mencari cara agar pohon tersebut dapat roboh. Dari hasil musyawarah mereka, diputuskan untuk memberikan sesajen berupa rokok kuning yang Bahan-bahan berasal dari pohon aren, disertai sirih, pinang, dan gambir yang telah ditumbuk. Setelah semua bahan disiapkan, para ahli makhluk gaib menggulung rokok kuning dari daun aren. Setelah daun aren ini menjadi rokok, rokok tersebut diberi kemenyan lalu diletakkan di bawah pohon tersebut. Ketika asap dari daun aren menyebar, pohon itu tumbang mengikuti arah asap tersebut. Setelah pohon tumbang, para panggoba sepakat memberikan nama lingkungan tersebut Dulamayo, yang termasuk wilayah Kampung Dungaliyo. Pada abad ke-18, terjadi pemekaran dari Kampung Bongomeme yang dikenal sebagai Kampung Dungaliyo. Setelah pemekaran, Dulamayo menjadi salah satu kampung mekaran yang disebut Kampung Dulamayo. Pemekaran Dungaliyo meliputi Dungaliyo, Dulamayo, dan Molopatodu. Sejak pertengahan abad ke-18, daerah yang diperluas ini dinamai Kampung Dulamayo. Pada awal abad ke-19, masyarakat Gorontalo sudah mengenal Kampung Dulamayo di Kecamatan Batudaa, yang sekarang telah berkembang menjadi Kecamatan Bongomeme.

Kondisi Awal Pada Saat Pembentukan Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme 1941-1999

Pada Saat Pembentukan Desa Menurut Penurutan Bapak Syamsudin Thaib mengatakan bahwa kondisi awal masyarakat pada pembentukan Desa Dulamayo dilihat dari segi perekonomian masyarakat masih rendah dan untuk jenis pekerjaan pun terdapat petani tradisional. Yang dimaksud dengan petani tradisional adalah mereka petani yang masih menggunakan alat cangkul, dan alat bajak dengan hewan sapi.

Metode bertani yang digunakan memang masih tradisional, tapi tetap membantu masyarakat. Meskipun demikian, taraf hidup mereka masih rendah karena sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Dengan iklim tropis dan tanah yang subur, petani bisa menanam sepanjang tahun sehingga sektor pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari (Trimurti Ningtyas, 2021). Namun, infrastruktur seperti jalan di Desa Dulamayo banyak yang rusak dan berlubang, sehingga masyarakat terus berusaha memajukan desanya.

Pada tahun 1941, masyarakat Desa Dulamayo mengalami kesulitan berat karena kebijakan monopoli Jepang di sektor perdagangan yang membatasi aktivitas ekonomi pribumi hingga hampir berhenti. Sebagian besar penduduk bertahan hidup dengan bertani secara tradisional menggunakan alat sederhana, menanam padi, jagung, singkong, rempah-rempah, pisang, dan sayuran untuk kebutuhan keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih hidup secara subsisten.

Hal ini sesuai dengan penelitian Fauzan & Hasanah (2019) yang menyatakan bahwa pembentukan desa sering menghadapi hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia, terutama pendidikan yang rendah. Keterbatasan tersebut memengaruhi kemampuan desa

dalam membuat peraturan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan membuat peraturan desa sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan kepala desa dan mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri.

Desa Dulamayo pada Tahun 1941 masih memiliki bangunan-bangunan tradisional yang terbuat dari berbagai macam bahan yaitu tripleks, lata, dan ada juga bangunan pada saat itu yang sudah terbuat dari batu bata dan dilapisi dengan semen. Sedangkan pada zaman sekarang, sudah banyak perubahan dari bentuk bangunan maupun lingkungan masyarakat. Dulamayo, khususnya dalam bidang pertanian, sudah menggunakan alat-alat modern agar hasil pertanian dapat tumbuh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masyarakat pada waktu itu hanya bekerja sebagai penjual jagung, namun pada saat itu masyarakat belum memiliki uang sehingga jagung tersebut hanya dijadikan sebagai bahan makanan mereka. Kerja paksa sangat merugikan masyarakat pribumi Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, mereka yang menolak bekerja atau berusaha kabur mendapat hukuman yang berat. (Syamsudin Thaib, Wawancara 28 Juni 2023).

Kondisi penduduk pada tahun 1941 pada tahun tersebut masyarakat sengsara dan menderita sebab Jepang Sistem monopoli yang diterapkan terutama di sektor perdagangan sangat mengurangi kemampuan ekonomi masyarakat pribumi secara signifikan. Kehidupan masyarakat Desa Dulamayo pada masa awal-awal hanya bermata pencaharian lebih banyak petani, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup, walaupun hanya menggunakan alat-alat tradisional saja. Masyarakat juga hanya bisa menanam sendiri di lahan pertanian mereka, seperti padi, jagung, singkong, rempah-rempah, pisang serta sayur-sayuran..

Tokoh-Tokoh Yang Terlibat Dalam Pembentukan Desa Dehingga Pada waktu itu, para ahli makhluk gaib (Panggoba) atau dukun berkumpul untuk mencari cara supaya pohon tersebut bisa tumbang. Mereka mempersiapkan rokok kuning yang dibuat dari daun aren, sirih, pinang, dan gambir yang sudah ditumbuk. Setelah semuanya siap, rokok tersebut digulung, lalu diberi kemenyan dan diletakkan di bawah pohon itu. Ketika asap dari rokok daun aren itu menyebar, pohon itu akhirnya tumbang mengikuti arah penyebaran asap tersebut. Menyebar. Setelah Pohon Tumbang, Maka Para Panggoba Sepakat Untuk Memberikan Satu Lingkungan itu dinamakan Dulamayo, yang merupakan bagian dari wilayah Kampung Dungaliyo.

Letak Geografis Desa Dulamayo

Geografi ialah ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan ruang dalam suatu wilayah. Secara spasial, gambaran geografis wilayah Desa Dulamayo sangat membantu dalam mendeskripsikan penulisan ini, khususnya dengan menelaah kondisi geografis wilayah tersebut di masa lampau yang menjadi bagian dari panggung sejarah. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan sejak tahun 1959 hingga saat ini. Kabupaten Gorontalo sendiri telah mengalami tiga kali pemekaran, yaitu pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten

Boalemo, dan pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango. Berikut tabel 1 batas wilayah Desa dulamayo.

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Dulamayo

Batas	Desa/Kelurahan	Kabupaten
Sebelah Utara	Desa pangadaa	Gorontalo
Sebelah Selatan	Desa Desa Huntulohulawa	Gorontalo
Sebelah Timur	Desa Pilolalenga	Gorontalo
Sebelah Barat	Desa Bongohulawa	Gorontalo

Sumber : Profil Desa Dulamayo

Periode Pemerintahan Desa Dulamayo tahun 1941-1999

Desa Dulamayo merupakan bagian dari Kecamatan Bongomeme, yang sendiri merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Batuda'a. Pada tahun 1941, ketika dunia tengah dilanda Perang Dunia II, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda, mulai mengalami pendudukan Jepang sejak 1942. Dalam konteks tersebut, Kepala Desa Dulamayo memiliki peran penting dalam mengatur urusan sehari-hari desa serta mempertahankan kesejahteraan masyarakat

Kepala desa yang memimpin selama periode awal termasuk Ombi Bungi (1941-1951), diikuti oleh Akuba Rahman (1951-1961), dan H.P Ibrahim (1961-1962). M. Dama (1962-1963) dan Nani A. Hasan (1963-1965) kemudian melanjutkan kepemimpinan, sebelum Akuba D. Nabu (1965-1978) memimpin untuk periode panjang. Setelahnya, Rani Dehi (1978-1999) dan Muslim Lanur (1999-2013) meneruskan kepemimpinan, diikuti oleh Herman Lauwo (2013-2019) dan saat ini dipimpin oleh Hermanto I Antu (Muslim Lanur, Wawancara 1 Agustus 2024).

Perkembangan Pemerintahan Desa Tahun 1940an

Masa pemerintahan desa mengacu pada periode waktu di mana seorang kepala desa atau pemerintahan lokal memimpin dan mengelola urusan pemerintahan di suatu desa. Masa pemerintahan desa biasanya ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Selama masa pemerintahan desa, kepala desa atau pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengurus berbagai aspek penting desa, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertanian, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Masa pemerintahan desa dapat bervariasi dalam durasinya, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

Keadan politik yang ada di Desa Dulamayo cukup berjalan dengan baik. Pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi, maka idealnya partisipasi politik masyarakat merasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif (Averus & Alfina, 2020).

Pemerintahan Desa Dulamayo untuk menjadikan sebuah desa yang sejahtera, akan tetapi pembangunan infrastruktur belum memandai, meskipun harapan masyarakat begitu tinggi untuk menjadikan sebagai desa yang maju. Pada masa kepemimpinan Ombi Bungi masih menata ruang politik sebab Desa Dulmayo. Pengembangan program belum tertata dengan sempurna, karena sumber daya manusia yang belum mempunyai untuk menjadikan desa ke ranah yang lebih maju, oleh karena itu program yg dapat dijadikan visi agar perkembangan desa dapat terlaksana yakni pada pembangunan infrastruktur saja. Selain dari itu program-program lain yang terfokus pada sektor ekonomi jarang di perhatikan, karena kurangnya SDM masyarakat pada tahun 1940an.

Menurut informasi dari para informan, pada masa kepemimpinan Bapak Ombi Bungi, pembangunan di Desa Dulamayo masih berada pada tahap awal dan belum maksimal. Pada periode pemekaran desa, kehidupan ekonomi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, di sisi politik, desa sedang dalam proses penataan dan penyusunan struktur yang lebih baik. Upaya-upaya ini merupakan langkah awal untuk membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan desa di masa mendatang, meskipun tantangan ekonomi saat itu masih besar (Muslim Lanur, Wawancara 1 Agustus 2024).

Menurut Hasan Lasena, salah satu tokoh masyarakat di Desa Dulamayo, desa tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan pada masa pemerintahan tahun 1960-an. Kemajuan ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, serta sektor-sektor lainnya. Hal ini terjadi karena adanya program pembaharuan desa yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah, khususnya di Desa Dulamayo. Ketika Akuba D. Nabu menjabat sebagai kepala desa, yakni pada periode 1965 hingga 1978, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari pembangunan, terutama melalui program-program yang mengarah pada kesejahteraan para petani. Perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat pada periode 1965–1978 sangat terasa, dan hal itu pula yang membuat Akuba D. Nabu memimpin desa dalam jangka waktu cukup lama, yakni sekitar 13 tahun sejak tahun 1965..Hal ini juga disampaikan oleh bapak Tum Telasena bahwa dampak yang paling dirasa sangat mensejahterkan masyarakat adalah pada zaman kepala desa Akuba D. Nabu:

"kami itu sangat merasa diperhatikan pada masa li kalapa desa Akuba D Nabu, banyak program yang dikasih ya memang mensejahterakan kaum tani bukan cuman itu tapi juga ti ayah ini memang sangat mengedepankan kami-kami kaum menengah kebawah, maknnya ti ayah ini atii menjadi kepala desa dengan waktu yang cukup lama ya karena beberapa program yang sangat dirasa mensejahterakan masyarakat Desa Dulamayo."

Mengacu pada kutipan langsung dari Rum Talasena, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang hidup di masa pemerintahan Akuba D. Nabu merasakan berbagai bentuk kesejahteraan, baik dari sisi infrastruktur, kondisi ekonomi, maupun situasi yang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Perkembangan Pemerintahan Desa Dulamayo Tahun 1960-1980an

Perjalanan perkembangan pemerintahan Desa Dulamayo terbilang lambat, karena selama bertahun-tahun, sejak tahun 1941, program-program yang diterapkan cenderung tidak mengalami perubahan dan tidak memberikan dampak berarti. Namun, memasuki era 1960-an, tepat ketika terjadi pergantian presiden dan Pada masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, pembangunan desa mulai mengalami kemajuan, terutama dalam aspek pemerintahan dan ekonomi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kawasan pedesaan. Fokus arah kebijakan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, memperbaiki mutu layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan daya saing desa itu sendiri. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa keberadaan suatu desa dapat dihapus jika dianggap perlu untuk kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, meskipun pengakuan terhadap eksistensi desa secara hukum dan politik semakin kuat, keberlanjutan desa masih sangat bergantung pada kehendak politik pemerintah yang berada di atas struktur pemerintahan desa (Kusnadi, 2015).

Hasan Lasena, Hasan Lasena, salah satu tokoh masyarakat di Desa Dulamayo, menyampaikan bahwa pada dekade 1960-an, desa tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena adanya program-program pembaruan desa yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas bawah, khususnya yang berada di wilayah Desa Dulamayo. Pada masa kepemimpinan Akuba D. Nabu, yang menjabat dari tahun 1965 hingga 1978, masyarakat merasakan dampak nyata dari pembangunan, terutama melalui program-program yang mendukung kesejahteraan petani. Perhatian besar dari pemerintah desa selama periode tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Akuba D. Nabu dipercaya menjabat kepala desa dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 13 tahun sejak 1965. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Tum Telasena bahwa dampak yang paling dirasa sangat mensejahterkan masyarakat adalah pada zaman kepala desa Akuba D. Nabu:

"kami itu sangat merasa diperhatikan pada masa li kalapa desa Akuba D Nabu, banyak program yang dikasih ya memang mensejahterakan kaum tani bukan cuman itu tapi juga ti ayah ini memang sangat mengedepankan kami-kami kaum menengah kebawah, maknnya ti ayah ini atii menjadi kepala desa dengan waktu yang cukup lama ya karena beberapa program yang sangat dirasa mensejahterakan masyarakat Desa Dulamayo."

Berdasarkan kutipan langsung yang disampaikan oleh Rum Talasena, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada masa pemerintahan Akuba D. Nabu banyak merasakan kesejahteraan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, maupun keadaan yang memberikan

keuntungan bagi masyarakat menengah ke bawah (Rum Talasena, wawancara, 1 Agustus 2024).

Perkembangan Program Pemerintahan Desa Tahun 1999

Pada tahun tersebut, kondisi desa masih kurang memadai. Bapak Muslim Lanur memimpin pemerintahan Desa Dulamayo dengan tujuan menjadikan desa tersebut sejahtera. Walaupun pembangunan infrastruktur sudah mulai cukup, seperti pembangunan kantor desa, masyarakat masih memiliki harapan besar agar desa ini bisa lebih maju. Pada masa kepemimpinan Rani Dehi, fokus lebih pada penataan ruang politik. Namun, saat Bapak Muslim Lanur menjabat pada tahun 1999, Desa Dulamayo mengalami kemajuan yang lebih baik. Infrastruktur sudah memadai, jalan-jalan telah diperbaiki, dan beberapa bantuan telah disalurkan sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (Toyo Paneo, wawancara, 3 Agustus 2024, Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme). Dengan perkembangan ini, Desa Dulamayo semakin maju dan terus menerima berbagai bantuan. Berikut tabel 2 bantuan Desa Dulamayo.

Tabel 2. Jumlah bantuan Pengentasan Kemiskinan Desa Dulamayo Tahun 1999

No	Uraian	Jumlah Penerima (orang)	SKPD Penanggung jawab	Tahun Penerimaan
1	Bantuan Beras	163	Bg.Ekonomi	1999/2005
2	Bantuan Pupuk jagung	107	Dinsos	1999/2005
3	Bantuan rumah	20	BPM-PDT	1999/

Sumber : Profil Desa Dulamayo

Tabel ini menjelaskan jenis-jenis bantuan yang diterima masyarakat Desa Dulamayo antara tahun 1999 hingga 2005. Sebanyak 163 orang menerima bantuan beras dari Bagian Ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan di desa. Bantuan pupuk jagung diberikan kepada 107 orang oleh Dinas Sosial dengan tujuan mendukung sektor pertanian dan meningkatkan hasil panen jagung. Selain itu, 20 orang memperoleh bantuan rumah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PDT), meskipun informasi mengenai tahun penerimaannya belum lengkap. Secara keseluruhan, tabel ini memperlihatkan berbagai dukungan yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pangan, pertanian, dan perumahan.

Kondisi Pendidikan Desa Dulamayo

Pada masa kepemimpinan Bapak Ombi Bungi di Desa Dulamayo pada tahun 1941, kondisi pendidikan di desa tersebut masih sangat terbatas. Desa ini belum memiliki sekolah, sehingga warga yang ingin menuntut ilmu harus pergi ke desa lain. Hal ini menunjukkan keterbatasan fasilitas pendidikan pada waktu itu, di mana akses ke pendidikan formal masih sulit dan terbatas. Selain itu, pada tahun 1941, Indonesia masih berada di bawah penjajahan

Jepang, yang juga memengaruhi sistem pendidikan di seluruh negeri (Subijanto, 2007). Selama pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengalami berbagai kendala. Pemerintah Jepang tidak mampu mengelola pendidikan secara baik, sehingga menyebabkan meningkatnya angka buta huruf di masyarakat. Sekolah Rakyat, sebagai salah satu inisiatif penting pada masa penjajahan, bertujuan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Sekolah ini menjadi lembaga pelopor pendidikan gratis yang didirikan untuk memberikan pendidikan dasar kepada rakyat selama masa penjajahan, sebagai bentuk perjuangan melawan ketidakadilan dan kebodohan. Sekolah Rakyat beroperasi dari tahun 1941 hingga 13 Maret 1946, pada masa akhir penjajahan Jepang, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi rakyat.

Pada 13 Maret 1946, setelah kemerdekaan Indonesia, Sekolah Rakyat resmi berubah nama menjadi Sekolah Dasar (SD) dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang baru. Perubahan tersebut menjadi titik awal dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih sistematis dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia pascakemerdekaan. Dalam beberapa dekade setelahnya, pendidikan di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 1960-an, pemerintah mulai melakukan reformasi pendidikan melalui pengenalan kurikulum baru dan perluasan jaringan sekolah. Kemudian, pada era 1980-an, pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dengan dicanangkannya program wajib belajar selama enam tahun. bertujuan agar setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan dasar.

Kehidupan Sosial Penduduk Desa Dulamayo

kehidupan sosial sangat berkaitan dengan interaksi sosial, sehingga bisa dipahami sebagai Interaksi sosial bersifat dinamis dan dapat terjadi antara individu satu dengan lainnya, kelompok satu dengan kelompok lain, maupun antara kelompok dan individu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam akan berdampak pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam proses interaksi, terdapat simbol-simbol, yaitu sesuatu yang memiliki nilai atau makna bagi penggunaannya (Kiki Endah, 2020).

Sejak dahulu, masyarakat Desa Dulamayo sangat mengutamakan nilai gotong royong. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa, Ibu Lina, di desa tersebut tradisi saling membantu dan tolong-menolong antar warga masih sangat kuat, terutama saat ada acara seperti pernikahan, khitanan, atau saat ada warga yang berduka. Masyarakat selalu bersama-sama membantu tanpa perubahan dari dulu hingga sekarang. Desa Dulamayo juga merupakan desa induk yang melahirkan beberapa desa pemekaran, seperti Desa Bongohulawa dan Desa Dulamayo. Namun, meskipun sudah terjadi pemekaran, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan, karena masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Di Desa Sekernan terdapat organisasi seperti PKK, Majelis Taklim, Remaja Masjid, dan Karang Taruna yang bertujuan memajukan Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme. Majelis Taklim adalah kelompok pengajian yang rutin diadakan pada hari tertentu di Masjid Al Maghfirah, Desa Dulamayo. Tujuan Majelis Taklim adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan mempererat silaturahmi. Selain pengajian di Masjid Sabilul Huda, Majelis Taklim juga mengadakan takziah dan yasinan di rumah warga yang sedang mengalami musibah.

Budaya Masyarakat Desa Dulamayo

Kebudayaan desa adalah sistem sosial yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat desa. Sistem ini mencakup berbagai aktivitas sosial, keagamaan, dan ekonomi yang dijalankan oleh warga desa dalam kehidupan sehari-hari. Aspek kebudayaan desa dapat dilihat dari seni budaya, adat istiadat, tradisi, serta bahasa yang ada di desa tersebut. Di Desa Dulamayo, terdapat tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan, yaitu tradisi huyula. Huyula adalah kegiatan gotong royong atau saling membantu antarwarga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, yang berlandaskan kebersamaan antaranggota masyarakat (Herman Luawo, wawancara, 1 Agustus 2024).

Kebudayaan desa merupakan suatu sistem sosial yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat desa. Sistem ini mencakup semua bentuk kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan desa bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti seni budaya, adat istiadat, tradisi, dan bahasa yang ada di desa tersebut. Desa Dulamayo memiliki tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan, yaitu tradisi huyula. Huyula adalah kegiatan gotong royong atau saling membantu antar sesama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, yang didasarkan pada kebersamaan antar anggota masyarakat.

Desa Dulamayo dikenal memiliki keunikan sebagai desa penghasil cemilan khas berupa gula-gula soba, yang sejak dulu hingga sekarang masih disukai banyak orang. Gula-gula soba ini dibuat dari perpaduan gula aren, gula pasir, santan kelapa murni, dan kacang tanah yang diolah dengan cara khusus sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Kebudayaan desa juga mencakup berbagai seni budaya yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Di Desa Dulamayo, tarian dana dana tradisional adalah salah satu seni budaya yang masih dijaga kelestariannya. Seni budaya ini menjadi bentuk ekspresi kebudayaan sekaligus identitas masyarakat desa tersebut. Selain itu, kebudayaan desa juga sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk nilai budaya serta adat istiadat masyarakat desa. Kedua hal ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Di Desa Dulamayo yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masyarakat rutin mengadakan festival Apangi sebagai perayaan menyambut tahun baru Hijriah.

KESIMPULAN

Setiap desa memiliki sejarah dan ciri khas unik yang terbentuk dari beragam peristiwa dan aktivitas penduduknya. Proses pembentukan dan perkembangan desa dimulai sejak desa itu didirikan. Setiap desa melalui perjalanan panjang yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan pendorong. Sejarah desa mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dari waktu ke waktu. Kegiatan warga serta peristiwa penting di desa berperan besar dalam membentuk identitasnya. Seiring waktu, desa terus berkembang dan maju, dipengaruhi oleh perubahan serta kemajuan di sekitarnya. Dengan demikian, setiap desa memiliki karakteristik khas yang menggambarkan perjalanan dan evolusi sejarahnya.

Pada abad ke-18, kampung Bongomeme mekar menjadi kampung Dungaliyo. Sejak saat itu, penduduk kampung Dungaliyo terus bertambah pesat. Untuk mengatasi pertambahan penduduk, warga membuka hutan ke arah barat untuk memperluas lahan pertanian. Dalam proses ini, mereka menemukan daerah yang dipenuhi pohon mangga hutan besar dan subur, yang kemudian dinamakan Dulamayo. Nama Dulamayo berasal dari banyaknya pohon mangga hutan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 591–605.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>
- Fahrudin. (2020). The Existence of Pesantren in The Dutch East Indies Government Pressure. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 351–365.
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v18i2.1854>
- Fauzan, E. M., & Hasanah, U. (2019). Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur – Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 97–102.
<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111>
- Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 407.
<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.369>
- Kiki Endah. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 564–580. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>

- Latif, F. R., Yunus, R., & Hasan, R. (2024). Desa Pilomonu Tahun 1995-2020. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 499–510. <https://doi.org/10.54082/jupin.325>
- Marza, Rahayu, N., Hambra, A., Makayasa, B., Pratama, A. R., Ahmad, M. A., & Trunojoyo. (2024). PT. Media Akademik Publisher Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia Ulil Amri Insan Kamil 5. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i11.900>
- Netty, N., Irwandi, I., & Dewi, R. (2021). Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 798–803. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15787>
- Putri, A. A., Nurjihan, F., Corry Betsena Br Tarigan, R., & Febriana, I. (2024). Pengembangan Teks Laporan Penelitian Dalam Penyusunan Historiografi Sejarah. *KOHESI: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/koehesi.v5i1.1653>
- Sihabudin, A. A. A. A. (2025). Milangkala Desa Saguling: Kajian Sejarah Lokal Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 120–131. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4766>
- Subijanto, S. (2007). Profesi guru sebagai profesi yang menjanjikan pasca Undang-Undang Guru dan Dosen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(67), 696–718. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i67.392>
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Trimurti Ningtyas, A. K. (2021). Pergeseran Mata Pencarian Pada Generasi Muda Petani Di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 14(2), 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.827>
- Widja, I. G. (1991). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Angkasa.